

# Akibat Lemahnya Penegakan Hukum

## Terkait Kerusakan Hutan di Papua

JAYAPURA-Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap L Ormuseray, SH, MSi, mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan terkait kerusakan hutan di Papua, adalah lemahnya penegakan hukum.

"Para penegak hukum belum mampu menjadi ujung tombak dalam menjaga dan mengamankan hutan dari aktifitas penebang liar yang terorganisasi rapi dengan jaringan bisnis dan kekuatan untuk mengendalikan dan menguasai berbagai sumberdaya hutan yang ada," kata Kadis Kehutanan Yan Ormuseray usai membuka Pelatihan Penanganan Kejahatan Kehutanan Dengan Pendekatan Anti Korupsi dan Pencucian Uang di Hotel Horison Jayapura, Senin (23/6).

Menurutnya, berbagai hasil studi berhubungan dengan hal ini menunjukkan fakta bahwa kejahatan kehutanan sangat erat kaitannya dengan korupsi, terutama dalam proses perizinan, konflik kepentingan, tumpang tindihnya perijinan lahan dan kompleksitas lainnya.

Dikatakan, proses penegakan hukum di bidang kehutanan sendiri, bukanlah merupakan persoalan yang mudah karena tingkat kompleksitasnya yang tinggi.

Untuk itu, lanjut Yan Ormuseray, diperlukan dukungan berbagai pihak yang berkepentingan baik instansi



Kadis Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap L Ormuseray, SH, MSi ketika memberikan sambutan pada Pelatihan Penanganan Kejahatan Kehutanan di Hotel Horison, Senin (23/6).

kehutanan, penegak hukum baik polisi, jaksa, pengadilan dan KPK maupun PPATK, perbankan, masyarakat sipil termasuk NGO, dunia akademisi dan masyarakat umum.

"Tanpa adanya sinergi dari berbagai pihak dengan peran yang diemban dan dijalankan, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan sumberdaya hutan kita dari proses kerusakan dan penghancuran yang semakin buruk," paparnya.

Diakui, selama ini kebanyakan pelaku

kejahatan kehutanan yang ditangkap adalah para pekerja bawahan dalam rantai produksi kayu ilegal antara lain penebang kayu di hutan, supir truk atau nahkoda kapal pengangkut kayu ilegal. Sementara itu, keuntungan besar justru diraup oleh segelintir cukong kayu yang sangat berpengaruh dan terlihat sangat sulit disentuh oleh hukum.

"Para cukong ini, merupakan aktor-aktor intelektual, yang biasanya beroperasi dengan modus yang sangat

canggih, sehingga keterlibatan mereka didalam kegiatan ilegal inilah yang mendapat perhatian serius dari kita semua khususnya oleh penegak hukum," katanya.

Yan Ormuseray mengungkapkan dalam praktek kejahatan kehutanan, penggunaan instrument hukum kehutanan ternyata belum mampu member efek jera kepada pelaku, sehingga penggunaan instrument hukum di luar instrument kehutanan sudah saatnya dijadikan pintu masuk penegakan hukum yang adil dan efektif untuk menjerat para pelaku kejahatan di sector kehutanan.

Ditambahkan, merek atidak hanya bisa dijerat dengan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, namun juga dapat diajukan ke pengadilan melalui instrument anti korupsi atau anti pencucian uang.

Untuk itu, salah satu program yang dilaksanakan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yakni penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan kehutanan menggunakan teknis investigasi anti korupsi dan anti pencucian uang.

"Saya harpapelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya," imbuhnya. (bat/nai)

## Due to the weak of Law Enforcement

### Deforestation in Papua

Jayapura –Head of Papua Provincial Forestry Dept, Yan L Ormuseray Yap, SH, M. Si expressed that one of the problems related to the destruction of forests in Papua, is the weak of law enforcement. The law enforcement agencies have not been able to spearhead the safeguard and secure the forest from illegal loggers activities neatly organized by the business networks who have power to control forest resources “said Yan Ormuseray after opening Training on Forest Crime Investigation using Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Approaches at Hotel Horison Jayapura on Monday (23/6).

According to him, various studies related to the fact that this shows forest crime is closely associated with corruption, especially in the licensing process, conflicts of interest, permitting overlapping land and other complexities.



He said, the process of law enforcement in the forestry sector itself is not an easy matter because of the high degree of complexity.

For it, said Yan Ormuseray, needed the support of various stakeholders from forestry agency, law enforcement including police officer, prosecutors, the courts, KPK and PPATK, banking, civil society including NGOs, academics and the general public world.

Without the synergy of the various parties to the role carried and executed, it will be very difficult to save our forest resources from the damage and destruction that the worse he explained

Admittedly, during this, most perpetrators arrested are forestry workers subordinates in the chain of illegal timber production among other loggers in the woods, or a truck driver transporting illegal timber ship captain. Meanwhile, the huge profits it obtains by very powerful brokers (*cukong*) and looks very difficult to be touched by the law.

This *cukong*, an intellectual actor, who usually operates with a very sophisticated mode, so that their involvement in this illegal activity deserves the attention from all of us, especially by law enforcement, said Yan.

Yan Ormuseray revealed, forest crimes in practice, the use of legal instruments forestry is not yet capable to give deterrent effect to the perpetrators, so the use of legal instruments outside the forest instrument can be used as the entrance for fair and effective law enforcement to catch the perpetrators in the forestry sector

He added, the master mind can not only be caught by the Forestry Law Number 41 of 1999 on Forestry Law or Law No. 18 Year 2013 on the prevention and eradication of the forest crime, but also can be proceed to the court by the Anti-corruption or anti-money laundering instruments.

To that end, one of the programs implemented by United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is strengthening the capacity of law enforcement officers in the handling of forest crimes using technical investigations of anti-corruption and anti-money laundering.

“I hope this training can increase the knowledge and skills of law enforcement officers in carrying out their duties” said Yan.